



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KAB. TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MASA RESES
MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2022 – 2023**

TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 12 MEI 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, MEI 2023**



LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022 – 2023 KE KAB. TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA TANGGAL 8 S.D. 12 MEI 2023

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara (Kab. Toba), Provinsi Bali dan Provinsi Papua Tengah.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja terkait dengan tujuan dibidang kesehatan diantaranya terkait jaminan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, penanganan stunting, transformasi kesehatan, transisi pandemi, dan dibidang ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah risiko resesi ekonomi saat ini.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI dalam penanggulangan pandemi Covid 19 dan perluasan kesempatan kerja dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

1.2 Dasar Kegiatan

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI Tanggal 15 Maret 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI
2. Menggali informasi realisasi program dan kegiatan yang dibiayai APBN
3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Sumatera Utara.

4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Utara terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI di.

1.4 Kegiatan

Pertemuan dengan Bupati Kab. Toba didampingi jajaran perangkat daerah yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke salah satu perusahaan investasi asing dan peninjauan ke Puskesmas dan langsung perkembangan percepatan pelaksanaan program-program perluasan kesempatan kerja dalam pemulihan ekonomi di tengah potensi adanya resesi ekonomi..

Pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sumatera Utara di dampingi :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Toba;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Toba;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Toba;
4. Kepala Loka POM Tobasa Kab. Toba;
5. Kepala UPT BP2MI Wilayah Sumatera Utara;
6. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh.;
7. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut);
8. Kepala BPJS Kesehatan Kab. Toba;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Toba Samosir;
10. Apindo Sumatera Utara
11. KSPSI Sumatera Utara
12. KSBSI Sumatera Utara
13. KSPI Sumatera Utara

Pendamping Mitra Komisi IX DPR RI:

1. Kementerian Kesehatan RI;
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI;
3. Badan POM RI;
4. BKKBN RI;
5. BP2MI RI;
6. Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan;
7. Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

1.5. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara (Kab. Toba) dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

NO	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIIL
1.	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA	KETUA TIM / WK. KETUA KOMISI IX	PKB	JATIM III
2.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.	ANGGOTA	PDIP	JATENG V
3.	A-200	Dr, DEWI ARYANI, M.Si.	ANGGOTA	PDIP	JATENG IX
4.	A-271	Drs. H. DARUL SISKA	ANGGOTA	GOLKAR	SUMBAR I
5.	A-67	ADE REZKI PRATAMA, SE, MM	ANGGOTA	GERINDRA	SUMBAR II
6.	A-70	Dr.Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.	ANGGOTA	GERINDRA	JAMBI
7.	A-73	Ir. SRI MELIYANA	ANGGOTA	GERINDRA	SUMSEL II
8.	A-380	NURHADI, S.Pd.	ANGGOTA	NASDEM	JATIM VI
9.	A-27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M.,	ANGGOTA	PKB	JATENG IX
10.	A-38	Ir. NUR YASIN, MBA.,M.T.	ANGGOTA	PKB	JATIM IV
11.	A-531	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD	ANGGOTA	DEMOKRAT	JAMBI
12.	A-569	HASAN SALEH	ANGGOTA	DEMOKRAT	KALTARA
13.	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	ANGGOTA	PKS	SUMUT III
14.	A-436	Dr.Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.	ANGGOTA	PKS	JABAR VIII
15.	A-453	H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.	ANGGOTA	PKS	KALBAR I
16.	A-480	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.	ANGGOTA	PAN	SUMUT II
17.	A-470	Sy. ANAS THAHIR	ANGGOTA	PKB	JATIM III

II. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 10-40 Lintang Utara dan 980 1000 Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan.



Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km², Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia.

Daerahnya terdiri atas pantai dan dataran rendah di sebelah timur dan barat provinsi ini, dan dataran tinggi yang terdapat di dataran tinggi Karo, Toba dan Humbang. Gunung-gunungnya antara lain Sibayak, Sinabung, Martimbang, Sorik Marapi dan lain-lain. Kemudian sungai-sungainya adalah sungai Wampu, Batang Serangan, Deli, Asahan dan lain-lainnya. Kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Utara adalah minyak bumi, batu bara, belerang, emas dan sebagainya yang merupakan hasil tambang. Dan kini provinsi ini lebih dikenal lagi dengan bendungan raksasa Asahan dengan air terjun Sigura-gura yang merupakan proyek besar pembangkit tenaga listrik. Flora ada bermacam-macam, dari tanaman yang ada di hutan dengan hasil hutan kayu, damar dan rotan, juga tanaman yang diusahakan oleh penduduk seperti padi, sayur-sayuran dan tanaman perkebunan lainnya.

Penduduk Sumatera Utara menurut golongan etnis terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah: suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-fak/Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir dan Nias. Golongan pribumi pendatang adalah suku: Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar, Palembang, Riau, Minangkabau dan lain-

lain, sedangkan penduduk asing adalah orang-orang Arab, India, Cina dan bangsa-bangsa lain. Penduduk Sumatera Utara sekitar 80% tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal di kota sebagai pedagang, pegawai, tukang dan sebagainya.

Susunan masyarakat di daerah Sumatera Utara adalah berdasarkan genealogis-teritorial atau suatu keturunan daerah dan wilayah, misalnya suku Batak Toba, Mandailing dan Nias. Sedangkan di wilayah Sumatera Timur atau Melayu adalah berdasarkan teritorial. Bila ditinjau dari kekerabatan dari segi garis keturunannya, maka suku Batak dan Nias adalah patrilineal yaitu garis keturunan yang dipandang dari garis keturunan Batak, dan suku Melayu adalah parental, yaitu garis keturunan yang dipandang dari kedua belah pihak, bapak dan ibu. Kelompok kekerabatan Nias disebut Sangabato yakni keluarga batih dan keluarga luas yang disebut sangabato sehua. Gabungan dari sangabato sehua dari satu leluhur disebut mado yang dapat disamakan dengan marga pada suku Batak, yakni klen besar patrilokal.

Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jumlah Penduduk Sumatera Utara pada 2018 mencapai 14,42 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut terdiri atas 7,19 juta jiwa laki-laki dan 7,22 juta jiwa perempuan. Sebanyak 7,21 juta jiwa penduduk di provinsi dengan ibu kota Medan ini tinggal di perkotaan dan sisanya di perdesaan.

Pada 2018, di Sumatera Utara terdapat 3,37 juta keluarga dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4 jiwa. Adapun rata-rata kepadatan penduduk mencapai 198 jiwa per km persegi. Medan merupakan kota dengan penduduk terpadat di Sumatera Utara, yakni 8.544 jiwa per km persegi.

Medan tercatat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2,26 juta jiwa. Deli Serdang di urutan kedua dengan jumlah penduduk 2,16 juta jiwa dan Langkat di posisi ketiga dengan penduduk 1,04 juta jiwa. Sedangkan Pakpak Bharat memiliki penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 48 ribu jiwa.

Data Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 menunjukkan kenaikan sebanyak 7,45 juta orang, naik 224 ribu orang dibanding Februari 2018. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 1,21 poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,03 poin menjadi 5,56 persen pada Februari 2019. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT jenjang Universitas mendominasi yaitu sebesar 8,76 persen.

Penduduk bekerja di Sumatera Utara pada Februari 2019 sebanyak 7,04 juta orang, bertambah 213 ribu orang dari Februari 2018. Persentase lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja yang mengalami peningkatan adalah Pertanian (1,51 poin), Penyediaan Akomodasi (1,14 poin) dan Transportasi (0,50 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan pada Perdagangan (1,79 poin), Administrasi Pemerintahan (0,41 poin) dan Industri Pengolahan (0,35 poin). Sebagian besar dari penduduk bekerja yakni 60,25 persen (4,24 juta orang) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, dari Februari 2018 pekerja informal turun hingga 1,93 poin. Dalam satu tahun terakhir, pekerja paruh waktu turun sebesar 3,26 poin. Sementara itu pekerja penuh dan setengah pengangguran mengalami kenaikan.

2.1 GAMBARAN UMUM KAB. TOBA

Demografi, Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Kabupaten Toba menurut sensus tahun 2022 mencapai 212.133 jiwa. Berdasarkan perkiraan statistik Kabupaten Toba selama periode 2019-2024 Jumlah angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Toba pada golongan umur 60+ tahun, proporsinya mengalami penurunan yang semula diperkirakan sebesar 15,03 persen

tahun 2019 dan 14,89 persen tahun 2024. Sementara itu kelompok umur dengan jumlah angkatan kerja terendah adalah golongan umur 15-19 tahun sebanyak 10.580 orang turun menjadi 10.168 orang pada tahun 2024. Semakin gencarnya program wajib belajar diperkirakan mengakibatkan banyak anak-anak usia sekolah yang terus dapat ditahan dibangku sekolah diyakini yang menjadi penyebab terus menurunnya proporsi angkatan kerja kelompok umur 15-19 tahun.

Kabupaten Toba sebagai salah satu Kabupaten diantara 9 Kabupaten di sekeliling Danau Toba terdiri dari 16 Kecamatan, dengan jumlah 13 Kelurahan dan 231 Desa Luas wilayahnya mencapai 2.021,8 Km². Terdapat 17.438 Ha lahan persawahan dan memiliki luas lahan kering sebesar 9.641 Ha. Disamping itu, juga terdapat lahan tidur seluas 30.446 Ha.

Dibidang ketenagakerjaan, mengacu pada perkiraan TPT (tingkat pengangguran terbuka) untuk tingkat pendidikan Diploma merupakan yang paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, dimana mencapai 4,86 persen di tahun 2019, dan meski diperkirakan menurun hingga tahun 2024 menjadi sebesar 2,52 persen, kondisi ini perlu dikaji apakah jurusan kejuruan yang saat ini diterapkan di Kabupaten Toba sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga kedepan perlu disiapkan kejuruan yang dapat mengakomodir kebutuhan tenaga kerja melihat dari lokasi dan potensi pada sektor-sektor prioritas sebagaimana Danau Toba telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas.

Dibidang sistem penetapan upah minimum kabupaten dilakukan dengan mekanisme Dewan Pengupahan Kabupaten Toba merumuskan besaran UMK sebagai bahan rekomendasi Bupati kepada Gubernur, untuk ditetapkan Gubernur Sumatera Utara.

UMK yang direkomendasikan oleh setiap Kabupaten/Kota lebih besar dari UMP yang pada tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Permenaker RI nomor 18 tahun 2023 dengan formula

$$UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian\ Nilai\ UM \times UM(t))$$

$$UM(t+1) = \text{Upah Minimum yang akan di tetapkan}$$

$$UM(t) = \text{Upah Minimum Tahun Berjalan}$$

$$\text{Penyelesaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (PE \times \alpha)$$

Keterangan :

PE : Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi : Inflasi Provinsi yang dihitung dari periode September Tahun lalu sampai dengan September Tahun berjalan dalam persen

α : Wujud Indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Penyesuaian UMK tahun 2023 di Kabupaten Toba memilih konstanta alpha sebesar 0,2.(nol koma dua)

III. HASIL-HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Kabupaten Toba sebagai salah satu Kabupaten diantara 9 Kabupaten yang berada mengelilingi Danau Toba terdiri dari 16 Kecamatan, dengan jumlah 13 Kelurahan dan 231 Desa Luas wilayahnya mencapai 2.021,8 Km². Terdapat 17.438 Ha lahan persawahan dan memiliki luas lahan kering sebesar 9.641 Ha. Disamping itu, terdapat lahan tidur seluas 30.446 Ha. Dibidang ketenagakerjaan, sistem penetapan upah minimum kabupaten dilakukan dengan mekanisme Dewan Pengupahan Kabupaten Toba merumuskan besaran UMK sebagai bahan rekomendasi Bupati kepada Gubernur , untuk ditetapkan Gubernur Sumatera Utara.
2. Dalam pembangunan yang dijalankan, pembangunan dibidang SDM melalui Pendidikan dengan tingkat Pendidikan tertinggi saat ini, di tingkat diploma. Pada umumnya SDM Kab Toba mengambil pendidikan ke luar daerah, tetapi setelah berhasil tidak kembali. Jumlah Angkatan kerja Kabupaten Toba tahun 2022 mencapai 103.571 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka mencapai 1.682 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk yang bekerja di sector pemerintahan dan swasta mencapai 4.650 jiwa dan 5.791 jiwa dengan jumlah perusahaan mencapai 4.650 jiwa dan Jumlah TKA mencapai 52 jiwa.
3. Berdasarkan data ketenagakerjaan tersebut diatas, jumlah tenaga kerja dibidang pariwisata saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan daerah sebagai daerah yang menjadi salah satu pusat pengembangan pariwisata super prioritas.
4. Berdasarkan kebutuhan tenaga kerja dibidang pariwisata sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara khusus menyiapkan Pendidikan vokasi dibidang pariwisata guna menunjang program pemerintah yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata super prioritas.
5. Kondisi BLK di Kabupaten Toba saat ini masih berstatus Balai Latihan Kerja unit kerja Pemda Toba yang belum terakreditasi. Juga terdapat BLK Komunitas. Namun Permasalahan BLK-BLK tersebut belum ada sarana dan prasarana, tenaga instruktur pelatihan dan sebagainya. Saat ini pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebutuhan kerja di setiap kecamatan sesuai klasifikasi dan minat yang tersedia lapangan kerjanya. Juga melakukan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan melalui Balai Besar Pendidikan Vokasi Medan
6. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan perusahaan di Kabupaten Toba mencapai 34,83 persen atau 2.700 dari jumlah 8.000an perusahaann. Berdasarkan potensi jumlah peserta dari unsur pekerja bukan penerima upah di Kab. Toba mencapai 39.000an, namun yang terdaftar menjadi peserta masih diangka 8,98 persen atau sebesar 3000an. Terkait dengan klaim pembayaran kepada peserta, berdasarkan jumlah klaim kepesertaan mencapai 792.378.083.060 dari 60.181 klaim se Sumatera Utara.
7. Dibidang perlindungan pekerja migran Indonesia, Sumatera Utara merupakan urutan ke 5 jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Berdasarkan data BP2MI, jumlah PMI dari Kabupaten Toba yang ditempatkan ke luar negeri rata-rata mencapai 400 – 500 pekerja per bulan dengan daerah tujuan penempatan meliputi Korea Selatan, Jepang dan Eropa.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Untuk menyiapkan kebutuhan Balai Latihan Kerja sebagai unit pelaksana teknis daerah (UPTD) milik pemerintah daerah Kabupaten Toba, Kmenterian Ketenagakerjaan akan membantu revitalisasi BLK yang saat ini sudah ada, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menyiapkan SDM yang siap melayani kebutuhan kepariwisataaan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas, termasuk

menyiapkan tenaga instruktur dan program meskipun diakui masih banyak langkah-langkah koordinasi dengan kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

2. Untuk meningkatkan kepesertaan dan pelayanan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan sosialisasi program jaminan sosial yang dapat menjangkau seluruh Angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara
3. Dalam meningkatkan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara tujuan penempatan yang secara umum dilakukan secara procedural, dibutuhkan kantor pelayanan unit BP2MI. Untuk menyiapkan kantor unit pelayanan tersebut, masih diperlukan pembahasan bersama antara pemerintah daerah Kab. Toba dan BP2MI.
4. Dalam melaksanakan rekomendasi tersebut diatas, Komisi IX DPR RI akan mengawal langkah-langkah yang perlu dilakukan secara cepat untuk mewujudkan Danau Toba daerah tujuan wisata super prioritas yang di dukung oleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Disamping itu, Komisi IX DPR RI, akan melakukan pengawasan terhadap program penyiapan BLK UPTD Kab. Toba dengan dukungan daerah dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Demikian pula dengan sosialisasi perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan peningkatan pelayanan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Jakarta, 30 April 2023

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA TIM**

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.

(A-35)